

Kinerja Proyek P3T & PDKMK Program JPS Depnaker Sumatera Utara dalam Upaya Mengatasi Pengangguran

□ ***Prof. Dr. H. Muhammad Yacub, M. Ed.***
(Universitas Negeri Medan)

Abstract.

In order to solve booming of employment problems, after moneter and socio-economics crisis (since 1997) Indonesian government launching Social Safety Aids or Net (Jaring Pengaman Sosial or JPS). This study is focused on JPS which is run by Man Power Departement (Depnaker) Province of North Sumatra. JPS programs consist of two projects (1) Skilled Unemployment Development Project or Proyek Pembinaan Pengangguran Terampil (P3T) and (2) The Effect of Dry Season & Unemployment Problems Project or Proyek Dampak Kekeringan & Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK). Most of budget to run P3T and PDKMK are accepted by the people who are involved in JPS programs. The participant of P3T accepted salary and training to run a small entrepreneur/bisniss interprises, unfortunately some of them try to get another job as official of government of private servant after P3T project is end. The participant of PDKMK activities get a temporary works and salary, most of the farming activities are success, but in other activities, they do not reach the goal. JPS programs can be run in the future, if it is well plan, action and control.

Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menanggulangi krisis ekonomi dan sosial terutama masalah meningkatnya jumlah pengangguran sebagai rentetan dari krisis moneter maka pemerintah RI meluncurkan apa yang dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang melalui berbagai instansi terkait. Ada berbagai pendapat tentang realisasi dari program-program dan paket-paket Proyek Pembinaan Pengangguran Terampil P3T dan Proyek Dampak Kekeringan & Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK) yang dikembangkan pemerintah melalui beberapa instansi. Dana JPS yang diluncurkan pemerintah melalui berbagai departemen/kantor negara misalnya Depdagri, Depsos, Dep.Koperasi & PPK, BKKBN, Depnaker, Transmigrasi dll. JPS yang dikembangkan melalui Depnaker, ada paket-paket yang aktipitasnya memberi kesempatan kerja bagi para penganggur yang:

- (1) terdidik atau terampil dengan P3T yang dikaitkan dalam pembinaan usaha-usaha produktif/wirusaha dan
- (2) untuk tenaga-tenaga penganggur kurang terdidik

dengan PDKMK.

Selanjutnya ada pertanyaan sejauh mana dana JPS yang dikelola oleh Depnaker yang sedemikian besar jumlahnya itu sampai kepada warga masyarakat yang menjadi sasaran dari paket-paket tersebut terutama Program JPS yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah Depnaker-SU yang selalu menjadi tanda tanya bagi berbagai pihak terutama dari kalangan LSM yang tidak berpartisipasi dalam program tersebut..

Dalam jaman keterbukaan di era reformasi ini siapa saja dapat menyampaikan pendapatnya tentang topik apa saja, termasuk dalam hal JPS dengan berbagai masalah /kendala/kegagalannya atau keberhasilannya. Yang paling penting dari berbagai pendapat itu, sebaiknya berdasarkan oleh data atau fakta, bukan hanya dengan informasi yang parsial (sepotong-sepotong) apa lagi berdasarkan kabar burung yang tidak jelas atau gosip yang entah dari mana sumbernya. Untuk menjawab berbagai tanya tersebut perlu dilakukan penelitian.

Masalah Penelitian.

Sejauh mana dana JPS yang dikucurkan me-

lalui Kanwil Depbanker SU untuk program itu sampai pada sasaran?

- Apakah para peserta dalam paket-paket P3T program JPS itu berpartisipasi sebagaimana tujuannya yang diharapkan.
- Apakah para peserta dalam paket-paket PDKMK program JPS itu berpartisipasi sebagaimana tujuan yang diharapkan.
- Apakah dengan adanya program JPS di atas terdapat peningkatan pendapatan dan kualitas SDM terutama para peserta paket-paket yang telah disinggung di atas?

Tujuan Penelitian

- Dengan penelitian ini dapat memberikan fakta yang andal tentang operasionalisasi kegiatan JPS yang dikelola oleh Kanwil Depnaker Sumatera Utara
- Mendapat potret yang jelas sejauh mana dana yang diluncurkan sampai kepada sarannya.
- Merupakan salah satu jawaban atas dugaan dari masyarakat tentang tanda tanya tentang peluncuran dana JPS

Manfaat Penelitian.

- Dapat menjadi data yang andal untuk perencanaan dalam upaya menanggulangi pengangguran di kota dan desa.
- Menjadi bahan penelitian lebih jauh bagi siapa yang akan mendalami tentang upaya-upaya pembinaan ekonomi kerakyatan.

Tinjauan Teoritis.

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi dan upaya membuka lapangan kerja baru berbagai usaha telah dikembangkan maka pada akhir-akhir ini berbagai usaha agrobisnis dan industri, budidaya/beternak kambing, sapi, unggas, khususnya budidaya jangkrik dan cacing merupakan potensi yang cukup cerah. Bisnis cacing dan pupuk casting pada pedesaan di Pulau Jawa pada umumnya, di Jawa Barat pada khususnya usaha tersebut cukup menjanjikan. Beternak cacing tanah (ground worm)

jenis lumbricidae telah dikembangkan oleh sejumlah besar peternak yang dihimpun oleh Koperasi Petani Cacing Tanah Indonesia (Kopacindo) yang bekerja sama dengan PUSAT INKUBASI BISNIS USAHA KECIL (PINBUK) Wilayah Bogor (Bisnis Indonesia, Selasa, 8 Juni 1999).

Menurut para pelaku wirausaha dan pakar cacing tanah yang juga aktivis Asosiasi Vermi Indonesia (AVI) dan Pusat Inkubator Bisnis Indonesia (PIBI) peluang wirausaha cacing cukup prospektif. Pada bulan pertama usaha itu menghasilkan 4 ton pupuk kascing (bekas cacing) senilai Rp. 900.000,-. Empat bulan kemudian mereka meraup keuntungan Rp. 3.600.000,- perkg. Pada tahun 1997 Indonesia mengimpor 120.570.359 kg tepung ikan untuk pakan ternak. Tepung ikan itu bernilai 80.994.142 dollar US. Tepung ikan itu dapat diganti dengan tepung cacing produksi dari dalam negeri. (Sinar Tani, Rabu, 12/6-1999). Cacing tanah segar sangat bermanfaat untuk: makanan ternak, dan menu yang digemari di restoran elite di Australia, Canada dll. Cacing tanah yang dikeringkan dan digiling halus merupakan bahan baku untuk obat dan kosmetika. Di Jepang, Taiwan, Kanada dan Amerika Serikat cacing sebagai salah satu bagian dalam pembuatan biscuit dan minuman penyegar. Di Bandung dan sekitarnya sudah dimanfaatkan sebagai bahan obat yang manjur untuk penyakit tekanan darah rendah/tinggi, kencing manis, typhus, reumatik, disentri, maag, muntaber, asma, eksim dan penyakit kronis lainnya. Sedangkan kotorannya (bekas cacing atau kascing/casting) merupakan pupuk (verme compost) dapat menyuburkan tanah (Suara Tani, 12/6-1999)

Dalam penelitian lain tentang penggunaan pupuk casting untuk cabai merah (Capsicum annum) ternyata cukup baik karena ketersediaan unsur P cukup banyak. Dari hasil penelitian Aryani (1995) bahwa aplikasi pupuk casting terhadap tomat juga cukup baik (Ibid Simarmata, 1997)

Telah disinggung bahwa kegiatan-kegiatan JPS yang diluncurkan pemerintah melalui beberapa departemen/instansi misalnya : Dep. dalam negeri, pendidikan, tenaga kerja, koperasi, sosial, BKKBN, transmigrasi, kehutanan dll. Dari pihak Bappenas telah ada evaluasi tentang realisasi berbagai program

JPS dan dikatakannya bahwa JPS melalui bidang pendidikan dipandang relatif lebih aman jika dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya termasuk program padat karya yang dikembangkan oleh instansi terkait. Mengingat luasnya wilayah tanah air dan beragamnya tingkat/kualitas kemampuan petugas dan warga masyarakat yang dilayani maka siapa saja mesti berhati-hati dalam menyatakan pendapatnya atau hasil penilaiannya terutama tanpa didukung oleh data yang akurat atau melalui penelitian yang cermat dan dapat diandalkan.

Suatu hal yang mesti dimaklumi bahwa pelaksanaan program JPS di daerah-daerah di luar Jawa pada umumnya termasuk di Sumatera Utara dan dalam jajaran Depnaker pada khususnya, kegiatan-kegiatan proyek tersebut sosialisasinya baru dimulai sekitar pada awal Agustus 1998 dan realisasi kegiatan P3T dapat dimulai pada September 1998, sedangkan jadwal akhir waktu pelaksanaan yang tidak mungkin diperpanjang. Tidak heran jika kegiatan-kegiatan dalam paket-paket yang dikerjakan pada umumnya dilakukan serba terburu-buru dan mesti diakhiri pada waktunya pada bulan Maret 1999 ini.

Ketika Paket P3T akan diluncurkan di Sumatera Utara dan demikian di propinsi lainnya hanya sejumlah kecil dari petugas Depnaker yang memahaminya karena hanya beberapa orang saja yang mendapat bimbingan langsung dari Bappenas dan Pimpinan Proyek di Depnaker Pusat. Atas penjelasan dari Kanwil Depnaker Prop. SU dan Kepala Bidang Penta Karya dan jajarannya Paket P3T disosialisasikan kepada seluruh Kepala Kantor Depnaker dan siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan itu. Pada akhir bulan Juli 1998 penulis dan sejumlah rekan dari instansi di luar Depnaker mendapat undangan dari Kanwil Depnaker Prop.SU untuk mendapat penjelasan tentang Paket P3T walaupun petunjuk-pelaksanaan (juklak) untuk itu belum sampai kepada petugas yang memberi penjelasan ketika itu. Setelah pertemuan itu, sejumlah besar LSM yang ada di Medan/sekitarnya diundang dan penulis diikutsertakan dalam bimbingan/dialog yang berlangsung dengan tujuan agar para LSM yang berminat akan berperan aktif dalam realisasi kegiatan Paket-paket P3T. Dalam kegiatan tersebut sejumlah besar LSM

yang ada di Medan/sekitarnya merupakan mitra kerja dari Depnaker Propinsi Sumatera Utara telah diikutsertakan.

PAKET-PAKET yang ada dalam P3T ada dua jenis yaitu LEMBAGA EKONOMI PRODUKTIF (LEP) dan WIRA USAHA BARU (WUB). Wilayah Sumatera Utara mendapat jatah 145 paket LEP/WUB dan sekitar 300 Paket PDKMK. Setiap paket dapat diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari penganggur (unemployment). Para peserta Paket LEP/WUB adalah para penganggur atau mereka yang ter-PHK dengan latar belakang pendidikan SMTA sd SARJANA (pengangguran Terdidik/Terampil) dan terdaftar di kantor-kantor Depnaker atau menjadi klien dari LSM-LSM. Sedangkan dalam program PDKMK yang menjadi sasaran/peserta adalah para penganggur yang biasa kerja kasar secara massal (padat karya) misalnya untuk pekerjaan perbaikan jalan, parit, irigasi, pembuatan kolam ikan, mencangkul lahan pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pangan misalnya menanam padi, jagung, palawija, pemeliharaan ikan laut/air tawar dan semacamnya.

Untuk kegiatan-kegiatan Paket P3T itu para pengurus LSM/KSM dapat memajukan rencana kerja dalam bentuk proposal sesuai dengan pengalaman kerja mereka atau ruang lingkup yang dapat dikerjakan oleh masing-masing LSM yang merasa mampu melakukannya. Dalam setiap paket pesertanya 20 orang dan oleh LSM pengelola para peserta P3T itu dilatih dalam dua tahap yaitu melalui pembekalan awal berupa teori-teori/praktek dalam bidang-bidang kerja yang akan digeluti misalnya sebagai pelaku jasa kelistrikan, agrobisnis, bengkel, manajer koperasi/BMT dll. Setelah pembekalan awal para peserta itu di magangkan dalam sentra-sentra kerja misalnya kantor, bengkel, usaha agribisnis, BMT dll. Setelah terjun di sentra-sentra kerja para peserta itu diberi pembekalan lanjutan (pelatihan ke 2). Setelah pelatihan ke-2 selesai para peserta dimagangkan atau bekerja di sentra-sentra kerja atau bekerja di sentra usaha yang dibangun oleh LSM bersama para peserta P3T sampai kegiatan paket ini berakhir. Apabila kegiatan dalam paket ini berakhir di bulan Maret 1999 para peserta itu dapat bekerja di tempat-tempat

mereka dimagangkan atau pada sentra kerja lainnya. Yang paling diharapkan oleh pemerintah dalam kegiatan paket P3T ialah agar para peserta dapat bekerja di sentra – sentra tempat mereka dimagangkan atau membuka sentra usaha sendiri sehingga mereka tidak menganggur lagi setelah program P3T ini berakhir. Sedangkan dalam paket-paket PDKMK yang dikembangkan agar para penganggur (yang terkena PHK dan penganggur lainnya) yang cukup banyak di pedesaan dapat bekerja dan mendapat upah harian sebesar Rp. 7000,- sd Rp. 7500 perhari. Proyek PDKMK dapat saja dalam bentuk pekerjaan fisik (perbaikan jalan, irigasi) atau membuat kolam ikan/ternak, mengolah tanah pertanian untuk bertanam jagung, kentang, bibit coklat, cabai dan sebagainya. Upah untuk kegiatan paket-paket PDKMK itu dananya berasal dari pemerintah yang disalurkan oleh aparat Depnaker setempat (tahap pertama) dan melalui BRI (tahap kedua). Dari hasil penjualan ikan, jagung dll dari paket PDMK itu dananya digulirkan ke kelompok lain yang tidak/belum ikut serta dalam paket tersebut. Dana yang digulirkan itu 40 % kepada kelompok penganggur yang belum mendapat kesempatan dalam kegiatan PDKMK, sedangkan 40 % dapat didistribusikan kepada para peserta paket dan 20 % lagi untuk sewa lahan jika paket itu berjalan mulus dan berhasil.

Metodologi Penelitian.

Populasi dan sampel.

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah 145 Paket P3T dan 250 Pakart PDK-MK yang diluncurkan di 17 Dati II dalam Propinsi Sumatera Utara. Yang diambil sampel dalam penelitian ini 10 % dari paket P3T dengan 60 responden dan 33 dari 204 lokasi dengan 180 responden dari Paket PDKMK yang berlokasi di Dati II yang dipilih secara purposif yaitu Langkat, Binjai, Deli Serdang, Tanjung Balai, Asahan, Lab.Batu, Simalungun, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Selatan dan Nias.a.Instrumen penelitian dan pengumpulan data.

Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah : angket, wawancara dan observasi. Dalam pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama dari responden Paket P3T dan tahap ke II untuk responden Paket PDKMK

Pengolahan data.

Untuk pengolahan data dari penelitian ini digunakan analisis sederhana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kinerja Kegiatan P3T Di Lapangan

a. Realisasi Paket-paket P3T.

Dalam realisasi paket-paket P3T ada LSM yang melatih para lulusan SMTA sd Sarjana dalam keterampilan Teknik Kelistrikan dan setelah dilatih mereka dimagangkan di beberapa usaha jasa instalatur listrik yang merupakan mitra dari PLN setempat. Ada LSM yang merekrut para peserta lulusan Sekolah Pertanian (SPMA) sd Insinyur Pertanian yang dilatih dalam agrobisnis/agroindustri, pendamping petani dll. Oleh LSM yang memilih bidang agrobisnis/agroindustri para peserta itu dibina dan diarahakan agar membentuk usaha wirausaha dalam bidang yang mereka pilih. Ada juga LSM yang membina para peserta paket yang dikelolanya agar menjadi tenaga terampil dalam bidang kerajina keramik, batu aji, logam, kerajinan rotan dan konveksi. Untuk latihan keterampilan batu aji dan perhiasan logam para peserta dilatih di SMIK/SMK Laguboti – Tapanuli Utara. Di Tanjung Balai dan Sibolga ada LSM yang membina para peserta dalam usaha jasa ketrampilan servise radio-tv, bengkel mobil/sepeda motor, kerajinan mebel dll. Ada pula LSM yang membina para pesertanya menjadi manajer BMT yang berasal dari Dati II misalnya dari Binjai, Labuhan Batu, Simalungun, P.Siantar, Tapanuli Selatan / Utara, Tanah Karo dan Medan.

Fakta menunjukkan bahwa tenaga produktif yang

menganggur baik yang terdidik (yang terkena PHK atau belum pernah bekerja) dan terutama mereka yang kurang terdidik sangat banyak di mana-mana di Nusantara ini. Dalam realisasi paket PDKMK Kandeptaker setempat bekerja sama dengan para Pemerintah Daerah setempat (Camat dan Kepala Desa), bekerja sama dengan LKMD yang biasanya ada di di setiap desa yang menjadi mitra kerja; ada juga keikutsertaan KSM/LSM dalam kegiatan paket PDKMK di salah satu desa di Deli Serdang. Baik Paket-paket P3T maupun PDKMK dapat dikerjakan sesuai dengan rencana kegiatan yang dituangkan dalam proposal mesti diajukan ke pimpinan proyek yang ada di kantor Depnaker setempat. Proposal-proposal itu diajukan ke Kantor Depnaker setempat dan pada gilirannya diteliti/diseleksi di Kantor Wilayah Depnaker Sumatera Utara – Medan. Kedua bentuk JPS dalam lingkungan Dep-naker di atas akan berakhir dalam bulan Maret 1999 yl.

Dalam realisasi kegiatan P3T di wilayah Sumatera Utara tahun 1998/1999 fakta menunjukkan bahwa setelah diberi waktu yang relatif cukup dari proposal-proposal yang masuk dari sejumlah besar LSM yang ada di Medan dan sekitarnya pada bulan Agustus 1998 yl, hanya sekitar 3 % saja dari sekitar 50 proposal yang diajukan yang dapat dikatakan memenuhi syarat. Dengan fakta itu cukup jelas bagaimana kemampuan LSM yang ada dan mendaftar ketika itu. Agar semua paket yang tersedia dapat direalisasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Jakarta, maka pimpinan Proyek P3T yang didampingi oleh Tim Konsultan dan Tim Teknis memberi bimbingan yang intensif kepada para pimpinan LSM yang telah memajukan proposal dan sesuai dengan waktu yang tersedia ketika itu. Dengan rasa syukur kepada Tuhan YME dan kerjasama dengan semua pihak terutama dengan LSM-LSM yang mendaftarkan diri maka seluruh paket yang tersedia dapat distributed sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai juga dengan sebaran daerah kerja masing-masing LSM. Ada sejumlah kecil LSM yang terlambat

menyampaikan proposalnya atau secara administratif tidak memenuhi syarat yang mesti dipenuhi maka dengan rasa sangat menyesal ada LSM yang gagal dalam menangani paket-paket yang tersedia ketika itu. Dalam pada itu ada juga LSM-LSM yang akan mengikuti paket P3T, pada hal batas waktu yang tersedia telah berlalu. Untunglah ada revisi anggaran maka ada sebagian kecil dari LSM-LSM yang terlambat itu pada gilirannya dapat dilibatkan juga dalam menangani Paket P3T dalam tahun 1998/1999.

Dari uraian di atas cukup jelas bahwa program-program JPS sebenarnya hampir sama saja dengan Paket PBH - KEJAR USAHA (Dikmas – 1980-an) yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kegiatan paket P3T mirip dengan kegiatan di atas. Dan yang pasti dengan kegiatan P3T dan PDKMK ini merupakan upaya-upaya membantu para warga masyarakat yang menganggur/setengah menganggur atau terPHK mendapatkan pekerjaan secara sementara dan jika mungkin secara permanen.

b. Rekrutmen peserta P3T.

Dalam hal mendapatkan peserta dalam kegiatan Paket-paket P3T memang tidak diumumkan secara meluas, tapi dipercayakan kepada LSM-LSM yang bekerja-sama dengan Kandeptaker setempat. Dengan cara ini dapat dihindarkan terjadinya kasus-kasus pendaftaran calon naker seperti tragedi yang terjadi di beberapa kota lain misalnya di Surabaya yang telah terjadi jatuh korban yang sia-sia. Telah disadari sudah tentu ada kelemahan-kelemahan dengan cara ini tapi tragedi yang mengerikan dapat dihindarkan. Sisi positif dari cara ini mereka yang direkrut adalah orang-orang yang sesuai dengan program-program ketenagakerjaan yang dikembangkan oleh setiap LSM yang ikut serta dalam program P3T.

c. Distribusi biaya hidup untuk para peserta.

Para peserta yang telah resmi menjadi peserta dalam paket-paket P3T mendapat dana JPS sebesar Rp. 300.000,- setiap orang /perbulan mestinya delapan bulan dan realitanya hanya tujuh bulan. Alokasi dana yang lebih (satu bulan) digunakan untuk kegiatan P3T yang dilakukan oleh LSM-LSM yang terlambat mengikuti program di Medan dan Sibolga.

Pembayaran biaya hidup dilaksanakan oleh aparat Depnaker langsung kepada para peserta secara teratur dan tanpa ada potongan sedikitpun. Dari pengecekan langsung kepada peserta ternyata malah ada di antara LSM yang melalui musyawarah atau tidak dengan para peserta P3T yang menggunakan sebagian dari biaya hidup yang diterima oleh peserta itu untuk kegiatan-kegiatan awal dari paket yang dikelolanya atau untuk kegiatan lain-lain. Hal itu dapat dimaklumi karena tak sedikit dari LSM itu yang tidak memiliki modal/aset yang cukup dalam menggelingkan paket yang dikelolanya dan kepada para LSM itu tidak diberi dana awal (panjar) dari Depnaker, hal itu sesuai dengan ketentuan dari Depnaker pusat. Baru belakangan diketahui ada juga sejumlah kecil pimpinan Depnaker yang mengeluarkan dana awal (panjar).

Dari hasil pantauan bahwa dana peserta yang dipinjam oleh LSM itu pada umumnya telah dikembalikan kepada yang berhak setelah ada kucuran dana tahap pertama dari petugas Depnaker.

d. Pembinaan keterampilan para peserta P3T.

Setiap LSM harus melakukan pemembekalan / pelatihan kepada seluruh peserta dalam dua tahap. Pelatihan-pelatihan oleh LSM-LSM untuk seluruh peserta P3T, benar-benar telah dilakukan dan terus dimonitor oleh aparat Tim Teknis - Depnaker yang melibatkan instansi terkait lain misalnya dari Pemda, Dep. Koperasi melalui dan Konsultatif dari Perguruan Tinggi; pemantauan oleh pihak BPKP terhadap Depnaker dan LSM-LSM yang ikut dalam JPS ini, juga tidak ketinggalan. Realisasi pembekalan dan pemagangan dapat dikatakan telah dilakukan LSM untuk para peserta. Kegiatan pemagangan/penempatan peserta juga dimonitor dan dievaluasi oleh tim-tim kecil yang memang dibentuk demi keberhasilan program JPS itu.

Dari beberapa sentra kerja yang dikunjungi oleh tim evaluasi dan konsultatif menyatakan bahwa ada sejumlah peserta P3T yang akan mereka gunakan sebagai tenaga tetap di bengkelnya, walaupun upahnya tidak sebesar yang diterima oleh peserta dari pemerintah ketika mereka mengikuti paket ini selama 7 bulan. Dikatakan demikian karena upah yang diterima oleh para pekerja tetap di sentra kerja pada umumnya

relatif lebih rendah dari upah yang dibayar oleh pemerintah melalui program JPS di Depnaker.

Penulis telah melihat langsung sentra-sentra kegiatan dan kantor LSM yang menjadi mitra kerja dalam kegiatan P3T. Ada kantor LSM ditata dengan baik dan ada juga kantor LSM yang sangat sederhana sekali. Ada kantor LSM yang dikunjungi (lebih dua kali) beberapa waktu yg, mudah-mudahan pimpinannya berada di luar Sumatera namun lebih banyak pimpinan LSM yang tidak demikian halnya. Dalam dialog dengan pimpinan LSM dan para peserta proyek P3T penulis mengharapkan agar semua pihak benar-benar menjalankan tugasnya agar program pemerintah yang ditunjang dengan dana yang tidak sedikit ini, benar-benar mencapai sasaran. Penulis dan rekan-rakan juga memonitor ketika pelatihan awal dan lanjutan yang dilakukan oleh para LSM. Sejumlah tempat magang dari peserta P3T misalnya di Tj. Balai, Laguboti, Sibolga, Padang Sidempuan dll juga dipantau secara seksama.

Dari obsevasi langsung tim teknis dan tim konsultatif ke sentra-sentra kegiatan yang dikembangkan oleh LSM-LSM ternyata bahwa sebagian besar LSM sangat serius dalam membina para peserta yang menjadi asuhannya ada juga LSM yang sibuk menangani friksi/krisis antar pengurus dalam LSMnya. Ada juga pimpinan LSM yang sulit dijumpai karena selalu berada di luar Sumatera Utara atau kantor pusatnya di Jakarta. Kami selalu berdialog dengan ketua kelompok yang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan secara tuntas. Seberapa jauhkah para peserta P3T mengalami peningkatan ilmu dan keterampilan yang ada pada mereka yang dibina oleh LSM (yang telah telah berpartisipasi dalam paket-paket di atas), dan apakah para peserta itu tidak menganggur lagi atau wirausaha yang telah ditumbuhkan terus bergulir, titik beratnya bukan terpondak pada pemerintah cq Depnaker, tapi terletak pada seberapa serius dan keandalan pembinaan dari masing-masing LSM yang terlibat.

Dari sejumlah kegiatan P3T bahwa sebagian dari hasil belajar/kerja dari para peserta misalnya hasil kerja kelompok pengrajin logam, batu aji, keramik dan kayu dan hasil kerajinan lainnya telah dibawa dalam Pameran Kegiatan P3T di Depnaker Pusat di

Jakarta. Pameran itu diikuti oleh utusan dari para peserta P3T/Depnaker dari 27 propinsi di Indonesia. Dari *hasil evaluasi dari Tim Penilai dari Depnaker Pusat di Jakarta* ternyata bahwa kinerja dan berbagai kegiatan P3T termasuk produk kerja para peserta paket-paket P3T dari wilayah Sumatera Utara ternyata berada pada *rangking ke II* setelah Propinsi Bali dan disusul oleh DKI Jakarta.

Kinerja Kegiatan PDKMK

a. Pelaksanaan proyek paket PDKMK.

Pengumpulan dan penggalian data untuk paket-paket PDKMK tidak hanya dari para pengelola proyek dan instansi terkait dan yang paling tidak mudah penggalian data dari *para Peserta* proyek PDKMK (penganggur yang terlibat dalam padat karya) Ketua kelompok kerja dan Tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Desa dan pimpinan LKMD setempat.

Dalam tulisan ini yang diekspose berdasarkan data dari *kelompok peserta saja*.

- 1) Pelaksanaan proyek :
 - a. dapat dikatakan berhasil dan cukup berhasil (73.63%)
 - b. yang menyatakan kurang berhasil 19.69 %, /tidak berhasil 9.5 %
- 2) Penyerapan tenaga kerja :
 - a. sesuai dengan sasaran 81.80 % dari para penganggur yang ada di sekitar lokasi
 - b. tidak sesuai dengan sasaran 18.20 %
- 3) Proyek fisik yang diketjakan dalam kegiatan padat karya ternyata:
 - a. dapat bermanfaat secara langsung dan
 - b. tidak langsung misalnya meningkatkan produksi pertanian, kelancaran transportasi, penjualan hasil panen/arus perdagangan lebih lancar

Dengan kegiatan proyek fisik dapat menciptakan kesempatan kerja:

 - a. secara langsung dirasakan masyarakat, walaupun secara bergiliran
 - b. mendapat upah secara langsung
 - c. dari upah kerja dimanfaatkan oleh peserta

padat karya adalah untuk:

(1) tambahan biaya rumah tangga	27.27%
(2) memenuhi kebutuhan makan	50.00%
(3) biaya sekolah anak-anak	18.20 %
(4) menabung	4.53 %

Dari hasil wawancara intensif pada sebagian besar penduduk desa yang padat penduduknya ternyata selama masa sulit ini cukup banyak mereka yang tidak mengkonsumsi ikan dan daging jika dibandingkan masa sebelumnya. Mereka merasa berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya proyek JPS ini. Namun demikian cukup banyak juga masyarakat di daerah-daerah tertentu yang merasa biasa-biasa dalam situasi krisis ekonomi sekarang, terutama mereka yang menggeluti produksi komoditi pertanian tertentu misalnya di daerah pegunungan. Di daerah ini masalah penyerapan tenaga kerja untuk padat karya tidak mudah didapatkan dan upah kerja juga sangat tinggi yaitu sekitar Rp. 10.000 sd Rp. 15.000,- perhari, pada hal upah kerja untuk pekerjaan kasar yang tersedia hanya Rp. 7.500,- saja. Oleh karena itu dalam realita kegiatan padat karya di wilayah-wilayah tertentu sulit diterapkan sesuai dengan juklak.

Pengguliran dana

Adanya upaya pengguliran dana untuk dimanfaatkan oleh kelompok baru pada mulanya tidak termasuk dalam tujuan dari kegiatan PDKMK. Atas dasar pemikiran dari para pengelola program ini di Depnaker di Sumatera Utara yang kemudian dijadikan kesepakatan secara nasional dalam kegiatan paket PDKMK di seluruh wilayah Indonesia maka dana yang dihasilkan dalam paket ini (misalnya dari hasil panen dalam bidang pertanian atau pemeliharaan ikan/ternak lainnya) digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang belum terlibat dalam paket PDKMK, paling tidak dana tersebut dibagi-pagi kepada kelompok tani yang terlibat dalam paket yang mereka kembangkan.

Dalam seluruh kegiatan PDKMK 20 jenis aktipitas yang dapat dikelompokkan atas empat kelompok : (1) pembangunan fisik, (2) pertanian, (3) perikanan, dan (4) kerajinan/industri kecil. Dalam hal pengguliran dana lebih banyak dari kelompok perta-

nian terutama kegiatan-kegiatan yang tidak gagal panen. Dalam kegiatan kerajinan dan industri kecil produknya dipasarkan kepada konsumen melalui instansi terkait dan dananya digulirkan kepada kelompok lain yang sedang mendapat pembinaan dalam bidang usaha yang sama. Dalam kegiatan Paket PDKMK dalam bentuk pekerjaan fisik misalnya perbaikan jalan, irigasi sudah tentu tidak mungkin ada pengguliran dana. Dalam pembuatan kandang ayam, kambing dan babi ternyata sarana usaha memang dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang memilih kegiatan usaha itu. Pengguliran dana belum terjadi karena ketika penelitian ini dilakukan hewan ternak yang dikelola peternak itu belum waktunya untuk dijual. Sedangkan untuk perikanan/peternakan memerlukan waktu lebih panjang, ketika penelitian dilakukan sebagian besar paket ini belum waktunya dipanen; ada juga tambak kepiting dan jaring apung mungkin gagal panen karena beberapa sebab. Ketika pengumpulan data dilakukan pelaksanaan Paket tahap II PDKMK belum seluruhnya dapat direalisasi; ada di antara paket tahap II yang masih dalam tahap penjajagan lahan, bahkan ada di antaranya dukokumennya belum ditanda tangani oleh pemerintah daerah setempat.

Pengaruh kegiatan PDKMK dan pemberdayaan ekonomi warga masyarakat.

Dalam uraian di atas (3) terlihat bahwa upah kerja yang didapatkan 66 % untuk kebutuhan makan sedang untuk keperluan lain misalnya menabung hanya 6 %. Pada sisi lain para pekerja kasar menilai bahwa upah yang diterima dapat dikatakan relatif sama dengan pendapat mereka di luar kegiatan PDKMK (74 %), sedang yang menyatakan lebih kecil dari upah yang biasa menerima upah di proyek (20 %). Cukup jelas bahwa dengan adanya proyek ini memang sangat membantu ketika situasi sedang sulit ketika itu, tapi belum dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Pengaruh terhadap pengembangan SDM.

Dalam hal dampak dari kegiatan PDKMK ternyata masih kurang jelas apakah memberi penga-

ruh terhadap pengembangan SDM. Karena pekerjaan yang dikembangkan adalah kerja kasar yang biasa mereka lakukan. Khusus bagi para penganggur eks PHK boleh jadi mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak biasa dikerjakan sebelumnya.

Beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian ialah belum solidnya keterkaitan antar instansi, kesadaran masyarakat terutama peserta proyek masih rendah, tidak mudah melakukan perubahan sikap/perilaku mereka dalam waktu yang singkat dan belum siapnya sebagian besar dari perangkat pemerintahan desa terhadap adanya proyek di daerahnya.

Sepintas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perencanaan yang lebih komprehensif, sosialisasi yang lebih intensif, dan keterlibatan LSM yang berpe-ngalaman dan kredibel tampaknya diperlukan juga. Sangat baik sekali jika ada keter-sambungan antara paket P3T dan PDKMK sehingga dengan LSM yang berkualitas dampak kegiatan program JPS itu tidak seperti kata pepatah habis arang batu binasa.

Kesimpulan

- a. Dana JPS yang sampai kepada sasarannya memang tidak seluruhnya (73.6 %), ada kebocoran namun tidak terlalu besar. Baik peserta Paket P3T maupun PDKMK merasa tertolong dengan adanya program JPS.
- b. Para peserta Paket P3T memang telah mendapat pembinaan dari sisi pe-ngetahuan dan keterampilan serta mendapat kesempatan dimagangkan dalam usaha-usaha wiraswasta namun sebagian dari para peserta ingin bekerja sebagai pegawai negeri atau swasta.
- c. Para peserta Paket PDKMK merasa tertolong dari kucuran dana JPS untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anaknya walaupun dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang dan ada sejumlah usaha kecil yang tumbuh dan bergerak dengan adanya proyek ini.
- d. Peningkatan kualitas SDM dari peserta Paket P3T memang ada namun perlu tindak lanjut, namun para peserta Paket PDKMK dapat dika-

takan tidak ada karena kegiatan yang dilakukan pada umumnya adalah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh mereka.

Daftar Pustaka

- Anonim, 1999. "Panduan Bisnis Cacing", *Makalah*, Kerjasa Sama Salak Training Centre- Improvement Institute, Jakarta
- Anonim, September, 1999. "Cacing Tanah Obat Serba Guna", *Republika*,
- Dadang Ahmad Mustofa, 1999. "Budidaya Cacing Tanah", *makalah*, mekar makmur, Bandung
- Lala Kumala, 1999, *Sukses Budidaua Jangkrik*, Arkola, Surabaya.
- M.Yacub, 1997, *berbagai upaya meningkatkan kualitas masyarakat pedesaan*, mader, Medan.
- , 1997, *Menumbuhkembangkan Koperasi/BMT Dalam Masyarakat Pedesaan*, Madera, Medan.
- Tualar Simarmata, 1997. "Upaya Peningkatan Pupuk Organik (Kascing dan Bokashi)", *Makalah*, Fak Peranian-Unpad-Bandung,
- Rahmat Rukmana, Mei, 1999. "Kelaikan Wirausaha Cacing Tanah", *Suara Tani*, rabu-
- Samsul Arifin, Mei, 1999. "Prospek Usaha Tani Cacing Tanah", *Suara Tani*,
- Wowo Sudarwo, 1999. *Cacing & Kascing*, Mekar Makmur, Bandung,